

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Komarudin, 1974, *Metode Tulisan Skripsi dan Tesis*, Citra Grafika, Bandung.
- Maftuh Efendi, 2010, *Perdalian Tata Usaha Negara Suatu Pemikiran*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki I, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, CV Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. SUMBER LAIN

Agnesya Mynerpha, 2023, *Peranan Majelis pengawas dan pembina daerah terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran tindak pidana suap di Kabupaten Sanggau*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Bambang Yunarko, 2013, *Kedudukan Jabatan dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara* Volume XVIII No. 3 Tahun 2013 Edisi September, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Indah Febri Rahayu, 2022, *Kewenangan Majelis Pembina dan Pengawas daerah PPAT Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor:20/G/2020/PTUN/PBR)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

Laela Dwi Cahyanni, 2022, *Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan* Volume VIII, Jurnal, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Nila Dara Mustika, 2022, *Pengawasan Terhadap PPAT oleh Majelis Pengawas Dan Pembina PPAT Daerah*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

KBBI, <https://kbbi.web.id/tanggung+jawab>,

